

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DAN SATKOWIL DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MIMIKA

Dewa Gede Mahendra¹
Lukman Munawar Fauzi²
Dahly Sukmapriyandhika³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : dewamahendra2303@gmail.com

Abstrak

Tata Kelola Kolaboratif antara pemerintah daerah dan Satkowil dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah dan Satkowil bersinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Hasil Tata Kelola Kolaboratif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan Satkowil (Kodim 1710/Mimika) telah efektif, terutama dalam meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Meskipun ketahanan pangan di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya terwujud, telah terjadi kemajuan yang signifikan. Hambatan utama dalam mencapai ketahanan pangan adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta perbedaan visi dan misi antara Pemerintah Daerah dan Satkowil. Untuk mengatasi hambatan ini, komunikasi, koordinasi, dan pemahaman tentang pentingnya ketahanan pangan perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pemerintah Daerah, Satkowil, Ketahanan Pangan

Abstract

Collaborative Governance of the regional government and Satkowil in realizing food security in Mimika Regency. The questions asked relate to how the regional government and Satkowil synergize in realizing food security in Mimika Regency. The results of Collaborative Governance between the Mimika Regency Regional Government and Satkowil (Kodim 1710/Mimika) has been effective, especially in increasing food availability and accessibility. Even though food security in Mimika Regency has not yet been fully realized, there has been significant progress. The main obstacles in achieving food security are the lack of coordination and communication, as well as differences in vision and mission between the Regional

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Government and Satkowil. To overcome this obstacle, communication, coordination and understanding of the importance of food security need to be improved.

Keywords: Collaborative Governance,, Regional Government, Satkowil, Food Security

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan telah menjadi kebijakan dan program prioritas strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, kebijakan dan program ketahanan pangan juga menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah. Hal ini merupakan kebijakan strategis sebagai respon atas permasalahan kurang gizi dan ketahanan pangan di Provinsi Papua Tengah. Secara formal, kebijakan dan program ketahanan pangan juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah. Untuk mendukung pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi Papua Tengah (*Food Resilience and Atlas* atau FSVA Papua) telah mengidentifikasi daerah-daerah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Peta ini merupakan informasi strategis dan alat yang sangat baik untuk memastikan bahwa kebijakan sumber daya yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang maksimal. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Menurut Baliwati (2004) secara umum, ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu kecukupan (*sufficiency*), akses (*access*), keterjaminan (*Resilience*) dan waktu (*time*). Dimana aspek tersebut ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

yang merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability dan stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*) dan pemanfaatan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil kerja dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan. Ketersediaan pangan menyangkut masalah produksi, stok, impor dan ekspor, yang harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan sebagian bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, pangan yang tersedia bagi keluarga harus cukup volume dan jenisnya, serta stabil dari waktu ke waktu.

Dalam agenda prioritas Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Ma'aruf Amin tahun 2019-2024 yang dituangkan dalam Nawa Cita mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang diterjemahkan sebagai kemampuan bangsa untuk mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2019-2024 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga pangan, terjaminnya harga pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat dilaksanakan oleh satu badan atau instansi saja. Dalam rangka mendukung program pemerintah guna memperkuat program ketahanan pangan di daerah dan dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini yang erat dengan perubahan yang signifikan, pemerintah melibatkan TNI khususnya TNI AD dalam mendukung kegiatan program ketahanan pangan, tentunya dengan harapan yaitu memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, penggunaan alat berat untuk mempercepat peningkatan produksi padi,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

organisasi yang mewadahi serta dukungan anggaran yang memadai.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pasal 8, menyebutkan bahwa salah satu tugas TNI AD adalah, “melaksanakan pemberdayaan pertahanan di darat.” Dalam pelaksanaannya, TNI AD melakukan segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam bentuk Pembinaan Teritorial. Pembinaan Teritorial menjadi salah satu fungsi utama TNI AD pada hakikatnya menjadi salah satu kegiatan utama dalam pencapaian tugas pokok TNI AD. Tugas tersebut bertujuan untuk memenangkan pertempuran di darat serta mengatasi kesulitan masyarakat. Dalam memenangkan pertempuran di darat, penyiapan ruang, alat dan kondisi juang menjadi modal yang mendasar. Salah satu bentuk penyiapan ruang, alat dan kondisi juang adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional dalam rangka pertahanan semesta.

TNI AD di masa damai, memiliki komitmen yang kuat dalam berperan aktif membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya, khususnya tugas operasi militer selain perang. TNI AD selalu berupaya membantu pemerintah di bidang pembangunan dan mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi Pembinaan Teritorial. Dari sisi inilah urgensi peran TNI AD dalam membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan energi dimunculkan. Tidak hanya satuan-satuan teritorial saja yang dapat diperankan oleh TNI AD dalam mewujudkan keinginan pemerintah ini.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari 28 kabupaten yang berada di Provinsi Papua pada 2021, Kabupaten Mimika memiliki ketahanan pangan tertinggi. Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

berkelanjutan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika menyatakan bahwa penanganan kerawanan pangan mencakup pengembangan sistem isyarat dini (SIDI), penguatan kelembagaan untuk penanggulangan rawan pangan, pencegahan kerawanan pangan, serta penanggulangan kerawanan pangan. Penanganan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa campur tangan masyarakat dan TNI.

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan bahan makanan (NBM) Kabupaten Mimika memberi gambaran bahwa ketersediaan energi dari berbagai kelompok bahan makanan sebesar 1.714,55 kkal/hr/ kapita, protein 68,13 gr/hr/kapita dan lemak 51,61 gr/hr/kapita. Dari data tersebut untuk ketersediaan energi masih di bawah standar nasional (standar nasional 2.500 k.kal/hr/ kapita), sedangkan ketersediaan protein sudah melampaui standar nasional (standar nasional 57 gr/kapita/hari). (Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021).

Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Mimika yang ada belum maksimal meskipun berada dalam ketahanan pangan tertinggi di wilayah Papua. Secara khusus dalam penelitian ini peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mimika terkait dengan ketahanan pangan dan implikasinya serta bagaimana peran TNI dalam hal ini Kodim sebagai pelaksana di lapangan yakni Babinsa, karena TNI AD sangat berkepentingan untuk menciptakan ketahanan nasional di bidang pangan. berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang terkait dengan pangan dapat menjadi pemicu bagi krisis yang berujung pada kehancuran sebuah negara dan daerah sehingga dapat menimbulkan konflik, bisa dibayangkan apabila tergantung dari negara lain dan suatu saat bermasalah dan diembargo pasti akan sulit sekali mengatasi, rakyat kelaparan, unjuk rasa dimana-mana maka akan menimbulkan kekacauan yang sangat besar yang dapat mengganggu keamanan negara

Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional, Satkowil di wilayah Kabupaten

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Mimika Gelar Kegiatan Peningkatan Kemampuan Babinsa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Babinsa guna mendukung program swasembada pangan Nasional. Keterlibatan Babinsa dalam upaya ketahanan pangan ini antara lain bertindak sebagai penyuluh yang senantiasa mendampingi para petani dilapangan. Keterlibatan TNI dalam upaya swasembada pangan didasarkan pada *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Menteri Pertanian dan Kasad guna mendukung ketahanan pangan Nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu cara guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan. Keadaan dan kondisi yang didapatkan dari sekelompok manusia yang diamati, gambar atau foto, dokumen resmi serta catatan wawancara. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan *Collaborative Governance* Pemerintah daerah dan Satkowil dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Mimika. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) yang menyatakan bahwa Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Moleong (2010:6) menyimpulkan bahwa: Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kompleks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan agar dapat menafsirkan fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat mendeskripsikannya dalam bentuk lisan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

maupun tulisan yang diamati oleh peneliti.

KERANGKA TEORI

Dalam buku Kajian Peran TNI-AD Ketahanan Pangan dan Energi Nasional tahun 2015 dijelaskan Pelibatan prajurit TNI AD dalam program swasembada pangan dikhususkan pada peningkatan produksi pertanian yang implementasinya dilakukan melalui pelaksanaan pendampingan dan pengawalan. Program ini dilakukan oleh satuan teritorial dari tingkat Kodam sampai dengan Koramil.

Kegiatan lainnya yang telah dilakukan TNI AD untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan antara lain gerakan reboisasi hutan dan lahan, atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL). Selain menanam kembali hutan, kegiatan lain dalam program ini adalah pemanfaatan lahan tidur untuk sebagai lahan pertanian. Selain itu, dengan kemampuan Satuan yang dimiliki TNI AD, seharusnya dapat meningkatkan infrastruktur petani khususnya di bidang pengadaan irigasi teknis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan TNI dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah berupa pengawalan/ pengawasan, pendampingan, penyuluhan dan pengadaan barang. Peran Pemerintah Kabupaten Mimika sendiri telah tertuang dalam renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika 2018-2023 dan dapat disimpulkan, peran dan tugasnya juga mencakup pada penyuluhan, pendampingan, pelatihan, pengawasan dan pengadaan barang. Sehingga penelitian kali ini dapat difokuskan pada Sinergi Satkowil dan Kabupaten Mimika dalam peran guna meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dalam hal ini dapat digambarkan dari 3 hal yakni:

- *Food Availability & stability* (ketersediaan pangan)
- *Food accesibility* (akses pangan)
- *Food utility* (penggunaan pangan)

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PEMBAHASAN

Setiap negara berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh penduduknya karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan menjadi bagian dari hak asasi setiap orang. Oleh karena itu, setiap negara termasuk Indonesia berupaya untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya dengan meningkatkan berbagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi negara-negara berkembang adalah masalah kerawanan pangan. Meskipun kemajuan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan dalam beberapa tahun terakhir, jutaan orang di negara berkembang masih kelaparan setiap hari. Penyebab kerawanan pangan sangat kompleks dan beragam, mulai dari kemiskinan dan kurangnya akses ke pasar hingga konflik dan ketidakstabilan politik. Di banyak negara berkembang, petani skala kecil sangat rentan terhadap kerawanan pangan, karena mereka sering kekurangan akses ke kredit, teknologi, dan pasar. Untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di negara berkembang, praktik pertanian berkelanjutan sangat penting.

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan; namun aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan (Suryana 2014). Penanganan masalah ketahanan pangan dan gizi melibatkan berbagai sektor dalam rangkaian isu terkait produksi, ketersediaan pangan, gizi, dan kesehatan. Pandemi covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 telah berkembang menjadi salah satu krisis global bidang kesehatan, ekonomi dan sosial yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang rawan pangan dan kelaparan secara signifikan. Workie et al (2020), menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 di negara berkembang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan dan mata pencaharian sehingga hal ini akan membawa masalah yang lebih luas pada terganggunya ketahanan pangan dan sektor

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pertanian. Demikian pula hasil analisis yang dilakukan oleh Udmale et al. (2020) bahwa negara yang paling rentan terhadap perubahan pasokan sereal berada di 15 negara dari Afrika,

10 dari Amerika Latin, enam dari Oseania, dan empat dari Asia. Pandemi Covid-19 dapat menyebabkan meningkatnya kerawanan pangan di negara-negara yang rentan tersebut.

Pada tahun 2022 ancaman krisis ketahanan pangan global diperparah dengan munculnya konflik geopolitik di berbagai belahan dunia, termasuk perang di Ukraina. Terhambatnya perdagangan internasional pangan dan pupuk dari wilayah Laut Hitam menjadi pemicu semakin parahnya krisis pangan global tersebut. Para pemimpin G20 menyadari besarnya tantangan tersebut sehingga pada pertemuan di Bali tahun 2022 menyepakati perlunya langkah-langkah konkrit untuk mengembangkan sistem pertanian dan pangan yang lebih resilien dan berkelanjutan untuk mengurangi terjadinya risiko krisis pangan dunia (Kemenlu 2022).

Di Indonesia masalah ketahanan pangan masih menjadi permasalahan dasar dalam mewujudkan Indonesia emas 2045, degradasi sumber daya pertanian ini terjadi, terutama untuk sumber daya lahan dan air. Luas baku lahan sawah terkonversi rata-rata setiap tahunnya mencapai sekitar 10,6 ha/tahun (Purbiyanti 2013). Pembangunan jaringan transportasi, perumahan, dan kawasan industri semakin meningkat dan terus berlangsung, konversi lahan pertanian, termasuk sawah irigasi juga terus terjadi sampai saat ini. Selain lahan, perubahan iklim global juga merupakan ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan berpotensi mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian. Tidak mungkin ada pertanian tanpa air, dan tidak dapat memiliki tumbuh-tumbuhan dan pertanian tanpa tanah (Gomiero 2016).

Ketahanan pangan telah menjadi kebijakan dan program prioritas strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

(RPJMN). Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, kebijakan dan program ketahanan pangan juga menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah. Hal ini merupakan kebijakan strategis sebagai respon atas permasalahan kurang gizi dan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika, dengan segala potensi maritim dan agrarisnya, memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Papua Tengah. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan fluktuasi harga pangan, menuntut perhatian serius dan upaya terpadu untuk memastikan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, telah berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai program dan inisiatif.

Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dikenal sebagai salah satu kawasan rawan konflik. Mereka mampu menghadirkan pembangunan lebih ke hadapan mereka, dirasakan, dan dibutuhkan oleh mereka. Salah satu pendekatan yang bisa menjawab adalah pendekatan pemberdayaan. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan tersebut, hingga dampak dan pencapaiannya dapat mereka ukur sendiri.

Masyarakat Papua terkenal dengan rasa solidaritas dan kekerabatan yang sangat tinggi. Apapun yang dirasakan sanak saudaranya ikut dirasakan oleh anggota keluarga yang lain termasuk keluarga jauh yang masih dalam satu fam dan suku. Tingginya solidaritas tidak jarang menjadi pemicu konflik hingga berujung terjadinya perang antar suku terlebih jika disertai provokasi pihak-pihak tertentu. Konflik bukan satu-satunya masalah sosial di Papua, rawan pangan merupakan ancaman lain yang harus dihadapi masyarakat Provinsi Papua. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia yang di rilis Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan *World Food Program* (2015) hampir seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Papua termasuk ke dalam kategori wilayah rawan pangan prioritas 1 dan 2.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Jika dibandingkan dengan pemetaan pada tahun 2020 tidak ada perubahan status rawan pangan di wilayah ini. Artinya dalam kurun waktu 5 tahun belum ada upaya yang mampu mengubah status rawan pangan di wilayah ini.

Angka kemiskinan Provinsi Papua juga cukup tinggi, data BPS menunjukkan hingga tahun 2023 angka kemiskinan wilayah Provinsi Papua mencapai 27,8% atau lebih tinggi dari angka kemiskinan Indonesia sebesar 11,25% (BPS 2023). Kabupaten Mimika sebagai salah satu kabupaten dengan kekayaan sumber daya mineral berlimpah tidak lepas pula dari permasalahan kemiskinan, dengan angka kemiskinan sebesar 16,11%. Pengentasan kemiskinan dan rawan pangan, menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Kampung Nusantara Bersatu (KNB) dan ATC di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) LPPM IPB bekerja sama dengan pemerintah. Model dusun mandiri merupakan model pengelolaan konflik yang digulirkan oleh CARE IPB di arahkan dalam upaya menyiapkan dusun yang memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan kebutuhan dasar warga masyarakatnya khususnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya dengan memanfaatkan sumber kearifan lokal secara mandiri.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Mimika memiliki wilayah yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian. Selain sektor pertambangan yang menjadi karakteristik perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Mimika, sektor pertanian pun menjadi salah satu sektor yang ikut mengambil bagian penting dalam perekonomian di Kabupaten Mimika. Pemanfaatan potensi ini akan berjalan secara optimal jika ada keterlibatan masyarakat terutama petani dalam menggarap lahan pertanian.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumberdaya alam yang dapat dioptimalkan seperti sumberdaya pertanian/tanaman pangan,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sumberdaya pertambangan dan penggalian serta sumberdaya laut/perikanan. Sektor tanaman pangan diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian Kabupaten Mimika. Hal ini dikarenakan sektor pertanian berperan sebagai pemasok bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber pendapatan bagi masyarakat Mimika. Pembangunan sektor pertanian terutama pengembangan subsektor tanaman pangan memberikan sumbangan atau kontribusi yang cukup besar pada pembangunan nasional.

Di bidang pertanian, tanaman pangan yang cukup banyak ditanam di Kabupaten Mimika. Jenis tanaman yang dilaporkan beserta bentuk produksinya meliputi:

1. Padi--Gabah Kering Giling
2. Jagung--Pipilan kering
3. Kedelai--Biji kering
4. Kacang tanah--Biji kering
5. Kacang hijau--Biji kering
6. Ubi kayu--Umbi basah
7. Ubi jalar--Umbi basah

Jenis Tanaman	Luas Panen Area	Produksi	Hasil per hektar
Padi Sawah	16594	90645	54,63
Padi ladang			
palawija	42	721	172,57
Jagung			
Ubi kayu	348	660	189,66
Ubi jalar	7	50	71,48
Kacang tanah	7,7	11,34	14,73
Kedelai			
Kacang hijau			

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, namun untuk mencapai ketahanan pangan yang optimal diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan Satkowil. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan dan program-program yang mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Mereka harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi petani dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan produksi pangan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan adanya akses yang mudah bagi petani untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam meningkatkan produksi pangan.

Di sisi lain, Satkowil juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Mereka bertindak sebagai koordinator antara pemerintah daerah, petani, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan terlaksananya program-program ketahanan pangan dengan baik. Satkowil juga dapat memberikan bantuan teknis kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung diversifikasi pangan yang lebih beragam.

Dengan adanya *Collaborative Governance* antara pemerintah daerah dan Satkowil, diharapkan dapat tercipta upaya yang lebih terintegrasi dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Dengan sinergi ini, diharapkan produksi pangan dapat ditingkatkan, distribusi pangan dapat diperbaiki, dan akses pangan bagi masyarakat dapat diperluas. Selain itu, sinergitas antara pemerintah daerah dan Satkowil juga dapat menjadi modal untuk mendorong inovasi dalam sektor pertanian dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

Faktor yang menjadi hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan *Collaborative Governance*

Collaborative Governance antara Pemerintah daerah dan Satuan Komando Wilayah (Satkowil) Kodim 1710/ Mimika sangat penting untuk mewujudkan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Kedua pihak harus bekerja sama untuk menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan pangan bagi semua lapisan masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap pangan yang berkualitas dan bergizi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam kebijakan dan program untuk mencapai ketahanan pangan, sedangkan Satkowil Kodim 1710/Mimika memiliki peran dalam mendukung implementasi program ketahanan pangan di lapangan.

Kerjasama antara Pemerintah daerah dan Satkowil Kodim 1710/Mimika dapat dilakukan melalui berbagai program seperti peningkatan produksi pertanian, pengembangan sistem distribusi pangan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pendidikan dan pelatihan bagi petani dan peternak. Satkowil Kodim 1710/Mimika dapat memberikan bantuan teknis dan logistik kepada petani dalam melakukan kegiatan pertanian yang berkelanjutan, serta memberikan perlindungan terhadap hasil pertanian dari ancaman seperti hama dan penyakit tanaman.

Selain itu, *Collaborative Governance* Pemerintah daerah dan Satkowil Kodim 1710/Mimika juga dapat bekerja sama dalam mengembangkan pasar pangan lokal, menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha mikro dan kecil dalam sektor pangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai pangan yang sehat dan bergizi. Dengan sinergitas yang baik antara kedua pihak, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika dapat terwujud dengan baik.

Diharapkan melalui kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dan Satkowil Kodim 1710/Mimika, ketahanan pangan di Kabupaten Mimika dapat terus ditingkatkan dan masyarakat dapat memperoleh pangan yang cukup, berkualitas, serta bergizi. Kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka dapat terlibat aktif dalam menjaga ketahanan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pangan di daerah tersebut. Sinergitas antara Pemerintah daerah dan Satkowil Kodim 1710/Mimika merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Namun, dalam prakteknya seringkali terdapat hambatan atau kendala yang menghambat sinergitas antara kedua pihak tersebut dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam mengatasi ketahanan pangan di Kabupaten Mimika adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Pemerintah daerah dan Satkowil. Ketika tidak ada koordinasi yang baik, maka program-program yang dilakukan akan cenderung tidak terkoordinasi dengan baik sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Selain itu, perbedaan visi dan misi antara dua pihak juga bisa menjadi hambatan dalam mencapai ketahanan pangan yang diinginkan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah daerah dan Satkowil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin serta membentuk tim kerja yang terdiri dari keduanya. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, maka program-program yang dilakukan akan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ketahanan pangan di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program ketahanan pangan, maka akan tercipta sinergitas yang kuat antara Pemerintah daerah, Satkowil, dan masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam mengatasi hambatan dan kendala sinergitas antara Pemerintah daerah dan Satkowil dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika, diperlukan kesadaran dan komitmen dari kedua belah pihak. Dengan adanya kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif, maka tidak akan ada hambatan yang tidak bisa diatasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan Sakowil (Kodim 1710/Mimika) telah saling bersinergi melalui komunikasi ataupun koordinasi yang baik sesuai dengan Konsep *Collaborative Governance* yang telah dikemukakan oleh Covey yakni :
 - a. Ber-Orientasi pada Hasil dan Positif. Program yang telah dilakukan oleh Pemkab Mimika dan Kodim 1710/Mimika berjalan dengan baik sehingga menghasilkan dan positif yakni hasil pertanian yang meningkat dan pembukaan lahan baru serta adanya pendistribusian bantuan yang baik, serta hal positif lainnya.
 - b. Perspektif beragam menggantikan atau melengkapi Paradigma. Perspektif yang beragam dalam penelitian ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi yang beragam dari Pemkab Mimika dan Kodim 1710/Mimika, namun tetap bisa saling melengkapi dalam komunikasi dan koordinasi yang dilakukan di lapangan.
 - c. Saling Bekerjasama dan ber-Tujuan Sama serta adanya Kesepakatan. Bekerjasama yang dimaksudkan covey ini bisa dilihat dari koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemkab Mimika dan Kodim 1710/Mimika (baik itu Dandim, Danramil ataupun babinsa) serta masyarakat sendiri.
 - d. Sangat Efektif diusahakan dan merupakan suatu Proses. Peneliti menilai bahwa program yang dilakukan secara bersama antar Pemkab Mimika dan Kodim 1710/Mimika sangat efektif dilihat dari hasil yang diperoleh.
2. Ketahanan pangan di Kabupaten Mimika belum benar-benar terwujud secara menyeluruh karena jika melihat stabilitas pangan tingkat rumah tangga di Kabupaten Mimika yang tetap harus dipenuhi dengan mendatangkan dari daerah lain di luar Kabupaten Mimika, namun secara bertahap telah menunjukkan perkembangannya segi ketersediaan pangan (hasil panen yang meningkat) dan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

aksesibilitas (bertambahnya jumlah lahan pertanian).

3. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam mengatasi ketahanan pangan di Kabupaten Mimika adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Pemerintah daerah dan Satkowil. Selain itu, perbedaan visi dan misi antara dua pihak juga bisa menjadi hambatan dalam mencapai ketahanan pangan yang diinginkan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah daerah dan Satkowil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin serta membentuk tim kerja yang terdiri dari keduanya. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ketahanan pangan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Biklen, 1992 : 121, Teknik Pengumpulan data, Jakarta. Covey, 2015, Jurnal pembangunan pada mahasiswa.
- Fiandan Y, dkk, 2015 Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (Studi pada Kabupaten Malang), Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Semester II: Ketahanan Pangan di Inodensia.
- John Crosswell, 2013 cara mudah menyusun Skripsi, Tesis, Desertasi, Jakarta.
- John CrossWell, 2013 Reseach Design pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix, Jakarta.
- M.D.La ode, 2006, Peran Militer dalam Ketahanan Nasional, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Goverment Institutions In The Transmigration Urban Development). Jurnal Ketransmigrasian [Internet], (2) Desember, pp.113-124 avalaible from: [http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS_INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI.pdf](http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH_DALAM_PEMBANGUNAN_KOTA_TERPADU_MANDIRI.pdf) [diakses pada tanggal 17 Maret 2017].
- Naskah Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bahan Ajaran tentang Doktrin TNI AD, Bandung.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

- Nasir, 2003 :44 prosedur penelitian, Bandung. Nurhemi, Shinta R.I. Soekro, Guruh Suryani R. Desember, 2014, Working Paper: Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan Tfp Dan Indeks Ketahanan Pangan, Bank Indonesia.
- Presiden Jokowi: Swasembada Pangan, Salah Satu Cara Tekan Impor.2014, <http://voaindonesia.com> diakses tanggal 15 Juli 2017
- Purwanti, Pudji. (2010) Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil dalam Mencapai Ketahanan Pangan. Malang, Press UB
- Rahmawati Triana, Noor Irwan, Wanumawatie Ike, 2014 Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)), Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiss., and Rebecca Miller. 2001. Jurnal : “Partnership Synergy : A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage”. New York Academy of Medicine. Published by Blacwell Publishers. USA
- Sugiono, 2014, Statistika Untuk Penelitian, Bandung.
- Sugiono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Jakarta,
- Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- UU No 18 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan.